

# **IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN HAJI REGULER 2025 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BERAU**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Muhammad Hilman Ghani**

**2110413110003**



**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**BANJARMASIN**

**2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN HAJI REGULER 2025 KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BERAU

- A. Nama Mahasiswa : Muhammad Hilman Ghani Nim : 2110413110003  
B. Dinyatakan lulus dengan nilai A dalam ujian mempertahankan skripsi Tingkat Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal : 23 Oktober 2025

C. Tim Penguji:

a. Ketua

Drs. H. Apriansyah, M.Si

NIP. 19670408 199303 1 003

(.....)

b. Sekretaris

Hussein Abdurahman, S.Sos., M.Si.

NIP. 1971103 199903 1 002

(.....)

c. Anggota

Drs. Saifudin, M.Hum.

NIP. 19640910 198903 1 005

(.....)

Banjarmasin, 1 Desember 2025

Ketua Pembimbing

Drs. H. Apriansyah, M.Si

NIP. 19670408 199303 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si

NIP. 19730122 199802 1 001



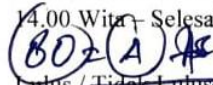
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123  
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**


Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 5730/UN8.1.13/KP.10.00/2025 tanggal 08 Oktober 2025 untuk menguji Skripsi :

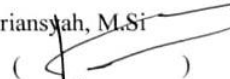

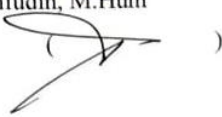
Nama : Muhammad Hilman Ghani  
NIM : 2110413110003  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Haji Reguler oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau Tahun 2025  
Tempat Ujian : Ruang Sidang 1 Gedung Lama FISIP ULM  
Waktu Ujian : 14.00 Wita - Selesai  
Nilai : **80** (A)   
Dinyatakan : Lulus / ~~Tidak Lulus~~

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

-----  
Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,  
  
Muhammad Hilman Ghani

1. Ketua : Drs. H. Apriansyah, M.Si  
(  )
2. Sekretaris : Husein Abdurahman, S.Sos, M.Si  
(  )
3. Anggota : Drs. Saifudin, M.Hum  
(  )

Mengetahui/membenarkan :  
Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Husein Abdurahman, S.Sos, M.Si  
NIP 197111031999031002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hilman Ghani

NIM : 2110413110003

Tempat Tanggal Lahir : Berau, 4 Maret 2003

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Penyelenggaraan Haji Reguler 2025 Kementerian Agama Kabupaten Berau" merupakan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Segala kutipan dan bantuan dari berbagai sumber telah diungkapkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari ketidakbenaran pernyataan tersebut.

Hal-hal yang terkait dengan teknis penulisan, telah sesuai dengan pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 8 Desember 2025



Muhammad Hilman Ghani

NIM. 2110413110003

## ABSTRAK

Muhammad Hilman Ghani, 2110413110003, *Implementasi Penyelenggaraan Haji Reguler 2025 Kementerian Agama Kabupaten Berau*. Dibimbing oleh Apriansyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagai bentuk pelayanan publik pemerintah di bidang keagamaan. Kementerian Agama Kabupaten Berau sebagai instansi pelaksana memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji reguler, mulai dari proses pendaftaran, bimbingan manasik, pemberangkatan, hingga pemulangan jamaah. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan baik dari sisi sumber daya, koordinasi pelaksana, maupun dinamika sosial politik daerah. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi penyelenggaraan haji reguler di Kabupaten Berau tahun 2025 telah sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 dan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pejabat dan staf Kementerian Agama Kabupaten Berau (terutama Seksi PHU), serta jemaah haji reguler tahun 2025

Penelitian ini mengungkap bahwa secara umum, layanan haji berjalan lancar dan sesuai prosedur, didorong oleh sikap pelaksana yang tulus dan koordinasi yang solid. Namun juga terdapat kendala ditemukan seperti data jemaah yang tidak diperbarui secara berkala serta terdapat temuan kesenjangan regulasi yang krusial: biaya transportasi jemaah ke embarkasi masih menjadi beban mandiri, bertentangan dengan amanat Pasal 65 PMA No. 13/2021 yang mewajibkan fasilitasi pemerintah daerah. Keterbatasan SDM dan tantangan geografis memperparah kondisi ini. Oleh sebab itu diperlukan komitmen politik dan adanya anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk segera memenuhi amanat regulasi mengenai fasilitasi transportasi. Sinergi pusat-daerah dan penguatan kapasitas SDM Kemenag juga menjadi kunci untuk menutup kesenjangan dan mewujudkan penyelenggaraan haji yang benar-benar adil dan sesuai regulasi

Dengan demikian, disarankan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Berau dapat memperkuat mekanisme jemaah dengan mengembangkan sistem yang lebih inovatif dengan basis digital, serta meningkatkan jumlah kompetensi SDM di PHU. Serta memperkuat lagi sinergi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam hal penyedia sarana dan prasarana seperti keberangkatan jemaah ke embarkasi di Kota Balikpapan.

**Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Haji Reguler.**

### **Abstract**

*Muhammad Hilman Ghani, 2110413110003, Implementation of Regular Hajj Services 2025 by the Ministry of Religious Affairs of Berau Regency. Guided by Apriansyah.*

*This research is motivated by the importance of organizing the regular Hajj pilgrimage as a form of government public service in the religious sector. The Ministry of Religious Affairs in Berau Regency, as the implementing agency, plays a strategic role in ensuring the smooth execution of the regular Hajj, from the registration process and manasik guidance to the departure and repatriation of pilgrims. However, in practice, the implementation of this policy faces various challenges related to resources, coordinator coordination, and local socio-political dynamics. This study aims to assess the extent to which the implementation of the regular Hajj in Berau Regency in 2025 aligns with the Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) Number 13 of 2021 and the theory of Van Meter and Van Horn (1975).*

*This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, field observations, and documentary studies involving officials and staff of the Ministry of Religious Affairs of Berau Regency (especially the Hajj and Umrah Organizing Section), as well as regular Hajj pilgrims for the 2025 period.*

*The study reveals that, in general, Hajj services ran smoothly and according to procedure, driven by the sincere attitude of the implementers and solid coordination. However, several obstacles were found, such as pilgrim data not being updated periodically, and a crucial regulatory gap was identified: the cost of pilgrim transportation to the embarkation point remains an individual burden, contrary to the mandate of Article 65 of PMA No. 13/2021 which requires facilitation by the local government. Limitations in human resources and geographical challenges exacerbate this condition. Therefore, political commitment and budget allocation from the Berau Regency Regional Government are needed to immediately fulfill the regulatory mandate regarding transportation facilitation. Central-regional synergy and strengthening the capacity of the Ministry of Religious Affairs' human resources are also key to closing the gap and realizing a Hajj implementation that is truly fair and compliant with regulations.*

*Thus, it is recommended that the Ministry of Religious Affairs in Berau Regency strengthen the pilgrim mechanism by developing a more innovative digital-based system and increasing the number and competence of human resources in the Hajj Organizing Section. Furthermore, it is crucial to enhance synergy between the Ministry of Religious Affairs and the Berau Regency Regional Government in providing facilities and infrastructure, such as the departure of pilgrims to the embarkation point in Balikpapan City.*

**Keywords: Policy Implementation, Hajj Pilgrims.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayat-Nya sehingga peneliti dapat menyusun ini dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Haji Reguler 2025 Kementerian Agama Kabupaten Berau”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Peneliti menyadari bahwa tulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Karenanya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar dapat melakukan penyusunan lebih baik untuk kedepannya. Pada kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu yang telah membantu penulisan ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si.
3. Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bapak Hussein Abdurrahman, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Apriansyah, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama penyusunan skripsi ini serta selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menghasilkan skripsi yang terbaik.
5. Hussein Abdurrahman, S.Sos., M.Si., selaku dosen penguji skripsi 1 yang akan memberikan arahan dan masukan untuk tulisan ini menjadi lebih baik kedepan.

6. Dr. Saifudin, M.Hum., selaku dosen penguji skripsi 2 yang akan memberikan arahan dan masukan untuk tulisan ini menjadi lebih baik kedepan.
7. Orang tua tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, cinta kasih, semangat, doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
8. Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Berau yang bersedia memberikan informasi dan data penunjang untuk penulisan ini.
9. Jemaah Haji Reguler Kabupaten Berau 2025 yang juga turut memberikan banyak informasi demi kelancaran penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan kepada penulis

Akhir kata saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, semoga kebaikan semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Banjarmasin, 15 Oktober 2025



Muhammad Hilman Ghani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR PETA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian .....	7
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Relevansi Penelitian dengan Ilmu Pemerintahan .....	11
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pemerintahan.....	12
2.3.2 Implementasi Kebijakan .....	15
2.3.3 Ibadah Haji.....	21
2.3.4 Dasar Aturan Ibadah Haji.....	24
2.3.5 Penyelenggaraan Haji Reguler.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian .....	34
3.3 Lokasi Penelitian .....	34

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4.1 Wawancara.....	34
3.4.2 Observasi.....	35
3.4.3 Dokumentasi.....	35
3.4.4 Informan.....	35
3.5 Teknik Analisa Data.....	35
3.5.1 Reduksi data.....	36
3.5.2 Penyajian data.....	36
3.5.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi.....	36
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>
4.1 Kabupaten Berau.....	37
4.1.1 Sejarah Singkat.....	37
4.1.2 Geografis.....	38
4.1.3 Pendidikan.....	42
4.1.4 Mata Pencaharian.....	43
4.1.6 Penganut Agama.....	44
4.2 Kementerian Agama Kabupaten Berau.....	45
4.2.1 Profil Singkat.....	45
4.2.1 Struktur Internal dan Tugas Pokok Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).....	50
4.2.3 Kuota Haji Reguler Kabupaten Berau.....	53
<b>BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	57
5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan.....	57
5.1.2 Sumber Daya Kebijakan.....	64
5.1.3 Ciri-ciri Badan Pelaksana.....	70
5.1.4 Komunikasi Antar Anggota.....	73
5.1.5 Sikap Para Pelaksana.....	77
5.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	79
5.2 Pembahasan.....	89
5.2.1 Analisis Standar dan Tujuan Kebijakan.....	89

5.2.2 Analisis Sumber Daya Kebijakan .....	91
5.2.3 Analisis Ciri-ciri Pelaksana.....	92
5.2.4 Analisis Komunikasi Antar Anggota.....	94
5.2.5 Analisis Sikap Para Pelaksana .....	96
5.2.6 Analisis Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Politik .....	98
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
6.1 Kesimpulan .....	100
6.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>